



RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025**

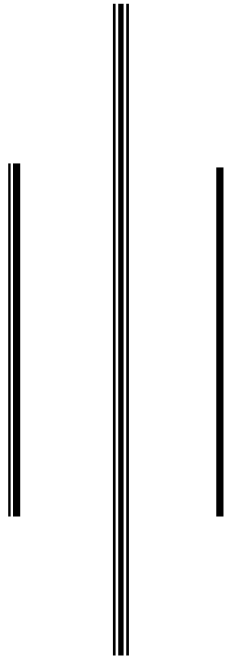


 (0294) 381966

 satpolkar.kendalkab.go.id



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun penyusunan Renja PD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sesuai Perda Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, Satpol PP mulai tahun 2017 berubah menjadi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran. Fungsi Pemadam Kebakaran bergabung dalam Satpol PP. Sesuai Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 sudah mengacu pada Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026 serta penyesuaian kebijakan pusat dan propinsi. Beberapa Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal pada Tahun 2025 adalah ikut menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah yang didukung dengan Peningkatan Kinerja PPNS, Pemenuhan target RPJMD serta pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM), juga penyesuaian implementasi Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja serta Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Perubahan Renja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan serta penetapan pagu pada Tahun Anggaran 2025.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KENDAL,



Drs. EMBANG DJOKO PITONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19690323 199003 1 008

DAFTAR ISI :

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I. Pendahuluan.....	3
1. Latar Belakang.....	3
2. Landasan Hukum	7
3. Maksud dan Tujuan	9
4. Sistematika Penulisan.....	10
 BAB II. Hasil Evaluasi Renja PD sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan	 12
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	12
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	53
3. Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	58
-Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	64
 BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	 66
 BAB IV. Penutup	 88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap PD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan PD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja PD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra PD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja PD, sesuai dengan rencana program prioritas pada RKPD. Renstra PD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD yang disusun ke dalam rancangan Perubahan Renja PD selaras dengan Renstra PD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra PD berdasarkan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Perubahan Renja PD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja PD dan mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam RKPD.

Mendasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2025 yang menyampaikan bahwa penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan pada minggu keempat bulan Mei tahun 2025, sehubungan dengan hal tersebut maka penyusunan Rancangan RKPD Perubahan telah mulai disusun pada bulan Maret 2025 dengan mendasarkan pada evaluasi RKPD tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

Penyesuaian ini diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tetap fokus pada pencapaian prioritas pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, perubahan rencana kerja ini juga diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Kendal Tahun 2025–2029, khususnya dalam hal penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, peningkatan sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan.

Perubahan RKPD juga mendasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang menyampaikan bahwa adanya pengurangan dana transfer dari pusat ke daerah dan instruksi kepada Bupati/Wali Kota untuk :

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion;
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%;
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar harga Satuan Regional;
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar

perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;

6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga;
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah.

Pemerintah Kabupaten Kendal telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, yang mencakup penyusunan ulang kegiatan, serta penguatan terhadap belanja prioritas dan strategis sesuai dengan arah kebijakan nasional dan daerah. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pasca-penetapan Peraturan Bupati tersebut, maka perlu dikeluarkan Surat Edaran Bupati Kendal Nomor 100.3.4.2/1342/2025 sebagai pedoman operasional bagi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Kendal.

Perubahan RKPD dilaksanakan untuk menyesuaikan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati periode masa jabatan 2025 – 2029 serta mensinergikan dengan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Tema/isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional, antara lain:

1. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
3. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
4. Pengendalian Inflasi di daerah;
5. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
6. Dukungan swasembada pangan; dan
7. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kendal adalah sebagai berikut:

1. Program penguatan Daya Saing SDM, diantaranya melalui
 - a. Peningkatan kualitas pendidikan
 - b. Insentif madin dan pondok pesantren
 - c. Pemerataan guru
 - d. Pemberian beasiswa "Satu Desa Satu Sarjana" bagi keluarga kurang mampu
 - e. Peningkatan insentif tenaga pendidik
 - f. Pengembangan budaya lokal
2. Program Kesehatan, melalui:
 - a. Universal Health Coverage (UHC)
 - b. Rumah Sakit Berjalan untuk Layanan Kesehatan Perdesaan
 - c. Pendampingan Kesehatan Keluarga
3. Program Ketenagakerjaan
 - a. Revitalisasi BLK Komunitas
 - b. Sekolah vokasi
 - c. Layanan khusus keluarga pekerja migran
 - d. Kerjasama dengan KIK
4. Program pembangunan ekonomi strategis berbasis potensi unggulan
 - a. Pembangunan bisnis centre
 - b. Pendampingan UMKM (100 UMKM naik kelas/tahun)
 - c. Fasilitasi permodalan bagi petani dan nelayan
 - d. Pengembangan kawasan peruntukan industri
5. Program Pelayanan Publik
 - a. Integrasi pelayanan publik dan pemerintahan dengan super apps
 - b. Bantuan keuangan khusus untuk desa
 - c. Integrasi moda transportasi antar wilayah
 - d. Birokrasi yang profesional, transparan dan akuntabel
6. Program peningkatan infrastruktur
 - a. Peningkatan konektivitas wilayah

- b. Penyediaan rumah layak huni
- c. Pengelolaan sampah melalui TPS3R (zero timbunan sampah)
- d. Pengembangan akses jalan dan transportasi
- e. Penataan trotoar kota
- f. Pembangunan batas wilayah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 246);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
 14. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 23);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah sebagai berikut :

1. Maksud

- a. Menjadi pedoman penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, serta Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2025.
- b. Penyesuaian terhadap visi, misi, dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati Kendal periode 2025–2030, sebagai pedoman pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan.
- c. Sinkronisasi dengan agenda pembangunan nasional, terutama program prioritas Presiden dan Wakil Presiden dalam Asta Cita, serta tema pembangunan nasional Tahun 2025.
- d. Penyelarasan perencanaan dengan isu strategis nasional, seperti penguatan ketahanan ekonomi, transformasi layanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan pembangunan inklusif berbasis wilayah.

2. Tujuan

- a. Menjamin konsistensi dan kesinambungan perencanaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.
- b. Menjabarkan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi kepala daerah ke dalam program/kegiatan yang lebih operasional dan berdampak langsung bagi masyarakat.
- c. Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun berjalan;
- d. Memberikan acuan bagi PD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun berjalan;
- e. Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun berjalan;
- f. Memberikan acuan bagi PD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun berjalan;
- g. Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun berjalan.

2.1. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Tahun 2025 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra PD.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan uraian Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Pendanaan Indikatif, dan Kelompok Sasaran

Bab V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I.

Capaian IKU Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal adalah Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan, dengan Tingkat Realisasi Capaian 22%, berupa pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada secara tuntas dalam 1 tahun di Triwulan I Tahun 2025 dan Persentase penanganan kebakaran sesuai standar tingkat waktu tanggap (*respon time*) dengan tingkat realisasi capaian 100 %, berupa jumlah penanganan aduan kebakaran yang dilaksanakan sesuai waktu tanggap (*respon time*).

Faktor Pendukung IKU : sinergitas antara aparat keamanan dan intelijen daerah. Faktor Penghambat IKU : belum optimalnya pemahaman masyarakat dalam kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpolkar Kendal, yang meliputi persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan serta persentase penanganan kebakaran sesuai standar waktu tanggap (response time), didukung oleh beberapa faktor kunci. Sumber daya manusia yang kompeten, serta koordinasi lintas instansi menjadi faktor utama yang mendorong keberhasilan pencapaian target kinerja. Selain itu, ketersediaan kendaraan dan peralatan yang memadai mempercepat penanganan kebakaran. Namun, keterbatasan anggaran dan luasnya wilayah jangkauan, standar kelengkapan yang kurang memadai menjadi hambatan signifikan, terutama dalam menjaga intensitas patroli dan mempercepat respon di daerah terpencil. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan pada peraturan dan tindakan preventif kebakaran juga memperlambat pencapaian IKU yang optimal.

Secara singkat hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran Adalah :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pagu anggaran	:	Rp 85.000.000	
Realisasi anggaran	:	Rp 700.000	
Realisasi anggaran (%)	:	0,82%	
Indikator kinerja capaian	:	Jumlah	Dokumen
		Perencanaan	Perangkat
		Daerah yang disusun	

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 3 Dokumen

Realisasi capaian kegiatan : 0 Dokumen

Tingkat capaian kinerja (%) : 0%

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan termasuk sub kegiatan yang dirasionalisasi dalam rangka efisiensi anggaran tahun 2025.

b. Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD

Pagu anggaran : Rp 15.000.000

Realisasi anggaran : Rp 0

Realisasi anggaran (%) : 0%

Indikator kinerja capaian : Jumlah Dokumen RKA
SKPD yang disusun

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 1 Dok

Realisasi capaian kegiatan : 0 Dok

Tingkat capaian kinerja (%) : 0%

Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan termasuk sub kegiatan yang dirasionalisasi dalam rangka efisiensi anggaran tahun 2025.

c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD

Pagu anggaran : Rp 15.000.000

Realisasi anggaran : Rp 0

Realisasi anggaran (%) : 0%

Indikator kinerja capaian : Jumlah Dokumen
Perubahan RKA SKPD yang
disusun

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 1 Dok

Realisasi capaian kegiatan : 0 Dok

Tingkat capaian kinerja (%) : 0%

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan termasuk sub kegiatan yang dirasionalisasi dalam rangka efisiensi anggaran tahun 2025.

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Pagu anggaran : Rp 15.000.000

Realisasi anggaran : Rp 0

Realisasi anggaran (%) : 0%

Indikator kinerja capaian : Jumlah Dokumen DPA
SKPD yang disusun

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 1 Dok

Realisasi capaian kegiatan : Dok

Tingkat capaian kinerja (%) : 0%

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan termasuk sub kegiatan yang dirasionalisasi dalam rangka efisiensi anggaran tahun 2025.

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Pagu anggaran : Rp 15.000.000

Realisasi anggaran : Rp 0

Realisasi anggaran (%) : 0%

Indikator kinerja capaian : Jumlah Dokumen
Perubahan DPA SKPD yang
disusun

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 1 Dok

Realisasi capaian kegiatan : 0 Dok

Tingkat capaian kinerja (%) : 0%

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun

keuangan dikarenakan termasuk sub kegiatan yang dirasionalisasi dalam rangka efisiensi anggaran tahun 2025.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pagu anggaran : Rp 15.000.000
Realisasi anggaran : Rp 0
Realisasi anggaran (%) : 0%
Indikator kinerja capaian : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 4 Laporan
Realisasi capaian kegiatan : 0 Laporan
Tingkat capaian kinerja (%) : 0%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan termasuk sub kegiatan yang dirasionalisasi dalam rangka efisiensi anggaran tahun 2025.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Pagu anggaran : Rp 10.000.000
Realisasi anggaran : Rp 0
Realisasi anggaran (%) : 0%
Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 1 Laporan

Realisasi capaian kegiatan : 0 Laporan

Tingkat capaian kinerja (%) : 0%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan termasuk sub kegiatan yang dirasionalisasi dalam rangka efisiensi anggaran tahun 2025 dan pelaksanaan kegiatannya di Triwulan IV.

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Pagu anggaran : Rp 80.000.000

Realisasi anggaran : Rp 0

Realisasi anggaran (%) : 0%

Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 18 Laporan

Realisasi capaian kegiatan : 4 Laporan

Tingkat capaian kinerja (%) : 22%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan termasuk sub kegiatan yang dirasionalisasi dalam rangka efisiensi anggaran tahun 2025 dan pelaksanaan kegiatannya di Sebagian besar di Triwulan II s.d IV. Ketercapaian kinerja 22% merupakan capaian kinerja laporan bulan Januari-Maret dan Triwulan I Tahun 2025.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**

Pagu anggaran	:	24.709.000
Realisasi anggaran	:	0
Realisasi anggaran (%)	:	0 %
Indikator kinerja capaian	:	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan	:	2 Paket
Realisasi capaian kegiatan	:	0 Paket
Tingkat capaian kinerja (%)	:	0 %

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan termasuk sub kegiatan yang belum dilaksanakan dan pelaksanaan kegiatannya di triwulan III.

b. **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Pagu anggaran	:	Rp 18.000.000
Realisasi anggaran	:	Rp 0
Realisasi anggaran (%)	:	0%
Indikator kinerja capaian	:	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan	:	4 orang
Realisasi capaian kegiatan	:	0 orang
Tingkat capaian kinerja (%)	:	0%

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan termasuk sub kegiatan yang belum dilaksanakan dan pelaksanaan kegiatannya di triwulan III.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pagu anggaran	:	Rp 30.000.000
Realisasi anggaran	:	Rp 0
Realisasi anggaran (%)	:	0%
Indikator kinerja capaian	:	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan	:	4 Paket
Realisasi capaian kegiatan	:	0 Paket
Tingkat capaian kinerja (%)	:	0%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan termasuk sub kegiatan yang belum dilaksanakan dan pelaksanaan kegiatannya di triwulan II s.d IV.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pagu anggaran	:	Rp 7.000.000
Realisasi anggaran	:	Rp 0
Realisasi anggaran (%)	:	0%
Indikator kinerja capaian	:	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan	:	1 paket
-------------------------	---	---------

Realisasi capaian kegiatan : 0 paket

Tingkat capaian kinerja (%) : 0%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan termasuk sub kegiatan yang belum dilaksanakan dan pelaksanaan kegiatannya di triwulan IV.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pagu anggaran : Rp 6.116.940

Realisasi anggaran : Rp 0

Realisasi anggaran (%) : 0%

Indikator kinerja capaian : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 6 Paket

Realisasi capaian kegiatan : 0 Paket

Tingkat capaian kinerja (%) : 0%

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan termasuk sub kegiatan yang belum dilaksanakan dikarenakan harga pasar melebihi pagu anggaran sehingga pelaksanaannya ditunda sampai dengan penyesuaian harga pasar dan pagu.

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pagu anggaran : Rp 80.000.000

Realisasi anggaran : Rp 12.669.000

Realisasi anggaran (%) : 15%

Indikator kinerja capaian : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 12 Paket

Realisasi capaian kegiatan : 3 Paket

Tingkat capaian kinerja (%) : 25%

Penyediaan Bahan Logistik Kantor belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan termasuk sub kegiatan baru dilaksanakan sebagian dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya di triwulan II s.d IV.

e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pagu anggaran : Rp 80.000.000

Realisasi anggaran : Rp 12.726.400

Realisasi anggaran (%) : 15%

Indikator kinerja capaian : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 12 Paket

Realisasi capaian kegiatan : 3 Paket

Tingkat capaian kinerja (%) : 25%

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan termasuk sub kegiatan baru dilaksanakan sebagian dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya di triwulan II s.d IV.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pagu anggaran : Rp 468.226.060

Realisasi anggaran : Rp 0

Realisasi anggaran (%) : 0%

Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 180 Laporan

Realisasi capaian kegiatan : 0 Laporan

Tingkat capaian kinerja (%) : 0%

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan termasuk sub kegiatan belum terlaksana dikarenakan belum ada kegiatannya dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya di triwulan II s.d IV.

g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Pagu anggaran : Rp 80.000.000

Realisasi anggaran : Rp 16.684.800

Realisasi anggaran (%) : 20%

Indikator kinerja capaian : Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 5 Dokumen

Realisasi capaian kegiatan : 1 Dokumen

Tingkat capaian kinerja (%) : 100%

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan termasuk sub kegiatan baru dilaksanakan sebagian dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya di triwulan II s.d IV.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pagu anggaran : Rp 5.000.000

Realisasi anggaran : Rp 900.000

Realisasi anggaran (%) : 18%

Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Perangko,
Materai dan Benda Pos
Lainnya

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 4 Laporan

Realisasi capaian kegiatan : 1 Laporan

Tingkat capaian kinerja (%) : 25%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan termasuk sub kegiatan baru dilaksanakan sebagian dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya di triwulan II s.d IV.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pagu anggaran : Rp 257.000.000

Realisasi anggaran : Rp 55.658.987

Realisasi anggaran (%) : 21%

Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang
Disediakan

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 12 Laporan

Realisasi capaian kegiatan : 3 Laporan

Tingkat capaian kinerja (%) : 25%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan termasuk sub kegiatan baru dilaksanakan sebagian dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya di triwulan II s.d IV.

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pagu anggaran : Rp 50.000.000

Realisasi anggaran : Rp 14.550000

Realisasi anggaran (%) : 29%

Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Peralatan

dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
Pemeliharaan Alat Kantor

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 12 Laporan

Realisasi capaian kegiatan : 3 Laporan

Tingkat capaian kinerja (%) : 25%

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan termasuk sub kegiatan baru dilaksanakan sebagian dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya di triwulan II s.d IV.

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pagu anggaran : Rp 160.000.000

Realisasi anggaran : Rp 7.950.000

Realisasi anggaran (%) : 4%

Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang
Disediakan

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 12 Laporan

Realisasi capaian kegiatan : 3 Laporan

Tingkat capaian kinerja (%) : 25%

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan termasuk sub kegiatan baru dilaksanakan sebagian dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya di triwulan II s.d IV.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan

Dinas Jabatan

Pagu anggaran	:	Rp 150.851.445
Realisasi anggaran	:	Rp 0
Realisasi anggaran (%)	:	0%
Indikator kinerja capaian	:	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan	:	57 Unit
Realisasi capaian kegiatan	:	57 Unit
Tingkat capaian kinerja (%)	:	0%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan sub kegiatan belum terlaksana dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya di triwulan II s.d IV.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pagu anggaran	:	Rp 50.000.000
Realisasi anggaran	:	Rp 5.638.000
Realisasi anggaran (%)	:	11%
Indikator kinerja capaian	:	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan	:	57 Unit
-------------------------	---	---------

Realisasi capaian kegiatan : 6 Unit

Tingkat capaian kinerja (%) : 11%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan termasuk sub kegiatan baru dilaksanakan sebagian dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya di triwulan II s.d IV.

II. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota :

- a.** Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

Pagu anggaran : Rp 30.000.000

Realisasi anggaran : Rp 0

Realisasi anggaran (%) : 0%

Indikator kinerja capaian : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 3 Dokumen

Realisasi capaian kegiatan : 0 Dokumen

Tingkat capaian kinerja (%) : 0%

Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat

Kabupaten/Kota belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan sub kegiatan belum terlaksana dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya di triwulan II s.d IV.

- b. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Pagu anggaran : Rp 1.041.200.000
 Realisasi anggaran : Rp 185.678.219
 Realisasi anggaran (%) : 17%
 Indikator kinerja capaian : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 12 Dokumen
 Realisasi capaian kegiatan : 3 Dokumen
 Tingkat capaian kinerja (%) : 24%

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan sub kegiatan baru dilaksanakan sebagian dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya di triwulan II s.d IV.

c. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Pagu anggaran : Rp 10.000.000
 Realisasi anggaran : Rp 0
 Realisasi anggaran (%) : 0%
 Indikator kinerja capaian : Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 100 orang
 Realisasi capaian kegiatan : 0 orang

Tingkat capaian kinerja (%) : 0%

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan sub kegiatan belum terlaksana dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya di triwulan II s.d IV.

d. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pagu anggaran : Rp 15.000.000

Realisasi anggaran : Rp 0

Realisasi anggaran (%) : 0%

Indikator kinerja capaian : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 4 Dokumen

Realisasi capaian kegiatan : 0 Dokumen

Tingkat capaian kinerja (%) : 0%

Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan sub kegiatan belum terlaksana dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya di triwulan II s.d IV.

e. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pagu anggaran : Rp 15.000.000

Realisasi anggaran : Rp 0

Realisasi anggaran (%) : 0%
Indikator kinerja capaian : Jumlah buku SOP dan buku profil yang disusun per tahun

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 1 Dokumen

Realisasi capaian kegiatan : 0

Tingkat capaian kinerja (%) : 0%

Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan sub kegiatan belum terlaksana dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya di triwulan II s.d IV.

f. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

Pagu anggaran : Rp 110.000.000

Realisasi anggaran : Rp 1.300.000

Realisasi anggaran (%) : 1%

Indikator kinerja capaian : Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 96 Kasus

Realisasi capaian kegiatan : 11 Kasus

Tingkat capaian kinerja (%) : 12%

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan sub kegiatan baru dilaksanakan sebagian dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya di triwulan II s.d IV.

g. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Pagu anggaran	:	Rp 70.000.000
Realisasi anggaran	:	Rp 1.200.000
Realisasi anggaran (%)	:	1%
Indikator kinerja capaian	:	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan	:	100 Kasus
Realisasi capaian kegiatan	:	12 Kasus
Tingkat capaian kinerja (%)	:	12%

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan sub kegiatan baru dilaksanakan sebagian dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya di triwulan

II s.d IV.

h. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

Pagu anggaran : Rp 20.000.000
Realisasi anggaran : Rp 0
Realisasi anggaran (%) : 0%
Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan
Penyediaan Layanan
Dampak Penegakan Perda
dan Perkada yang
Terlayani

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 5 Laporan
Realisasi capaian kegiatan : 0 Laporan
Tingkat capaian kinerja (%) : 0%

i. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pagu anggaran : Rp 25.000.000
Realisasi anggaran : Rp 0
Realisasi anggaran (%) : 0%
Indikator kinerja capaian : Jumlah Sarana dan
Prasarana Ketenteraman
dan Ketertiban Umum yang
Tersedia

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 8 Unit
Realisasi capaian kegiatan : 0 Unit
Tingkat capaian
kinerja (%) : 0%

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan sub kegiatan belum terlaksana dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya di triwulan II s.d IV.

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

a. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Pagu anggaran	:	Rp 2.272.520.440
Realisasi anggaran	:	Rp 4.386.500
Realisasi anggaran (%)	:	0,19%
Indikator kinerja capaian	:	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang Dapat Ditangani Sesuai SOP

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 120 Laporan

Realisasi capaian kegiatan : 3 Laporan

Tingkat capaian kinerja (%) : 2,5%

Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan sub kegiatan baru dilaksanakan sebagian dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya di triwulan II s.d IV.

b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

Pagu anggaran	:	Rp 15.000.000
Realisasi anggaran	:	Rp 0
Realisasi anggaran (%)	:	0%
Indikator kinerja capaian	:	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan

Daerah dan Peraturan
Bupati/Wali Kota

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 60 Laporan

Realisasi capaian kegiatan : 17 Laporan

Tingkat capaian kinerja (%) : 28%

Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan sub kegiatan belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan sub kegiatan baru dilaksanakan sebagian dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya di triwulan II s.d IV.

**3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Kabupaten/Kota**

a. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Pagu anggaran : Rp 50.000.000

Realisasi anggaran : Rp 1.450.000

Realisasi anggaran (%) : 2%

Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 4 Laporan

Realisasi capaian kegiatan : 0 Laporan

Tingkat capaian kinerja (%) : 0%

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Kabupaten/Kota belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan sub kegiatan belum terlaksana dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya di triwulan II s.d IV.

III PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN dan PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran	:	Rp 777.160.000
Realisasi anggaran	:	Rp 135.675.000
Realisasi anggaran (%)	:	17%
Indikator kinerja capaian	:	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan	:	365 Laporan
Realisasi capaian kegiatan	:	90 Laporan
Tingkat capaian kinerja (%)	:	25%

Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan sub kegiatan belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan sub kegiatan baru dilaksanakan sebagian dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya di triwulan II s.d IV.

b. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

Pagu anggaran : Rp 150.000.000
 Realisasi anggaran : Rp 18.250.000
 Realisasi anggaran (%) : 12%
 Indikator kinerja capaian : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 360 Dokumen
 Realisasi capaian kegiatan : 39 Dokumen
 Tingkat capaian kinerja (%) : 11%

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan sub kegiatan belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan sub kegiatan baru dilaksanakan sebagian dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya di triwulan II s.d IV.

c. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

Pagu anggaran : Rp 10.000.000
 Realisasi anggaran : Rp 0
 Realisasi anggaran (%) : 0%
 Indikator kinerja capaian : Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 10 orang

Realisasi capaian kegiatan : 0 orang

Tingkat capaian kinerja (%) : 0%

Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan sub kegiatan belum terlaksana dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya di triwulan II s.d IV.

d. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)

Pagu anggaran : 10.000.000

Realisasi anggaran : 0

Realisasi anggaran (%) : 0%

Indikator kinerja capaian : Jumlah Desa/Kelurahan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 1 Desa/Kelurahan

Realisasi capaian kegiatan : 0 Desa/Kelurahan

Tingkat capaian kinerja : 0%
(%)

Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan sub kegiatan belum terlaksana dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya di triwulan II s.d IV.

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Pagu anggaran : Rp 169.529.000

Realisasi anggaran : Rp 0

Realisasi anggaran (%) : 0%

Indikator kinerja capaian : Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 30 unit

Realisasi capaian kegiatan : 0 unit

Tingkat capaian kinerja (%) : 0%

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan sub kegiatan belum terlaksana dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya di triwulan II s.d IV.

e. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Pagu anggaran : 20.000.000

Realisasi anggaran : 300.000

Realisasi anggaran (%) : 1%

Indikator kinerja capaian : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan

Kebakaran dan
Penyelamatan Kebakaran
dan Non Kebakaran

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 3 dok

Realisasi capaian kegiatan : 0 dok

Tingkat capaian kinerja (%) : 0%

Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan sub kegiatan belum terlaksana dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya di triwulan II s.d IV.

2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

a. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Pagu anggaran : Rp 10.000.000

Realisasi anggaran : Rp 1.200.000

Realisasi anggaran (%) : 12%

Indikator kinerja capaian : Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan /Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 25 dok

Realisasi capaian kegiatan : 16 dok

Tingkat capaian kinerja (%) : 64%

Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan sub kegiatan belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan

dikarenakan sub kegiatan baru dilaksanakan sebagian dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya di triwulan II s.d IV.

3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Pagu anggaran	:	Rp 369.632.555
Realisasi anggaran	:	Rp 250.000
Realisasi anggaran (%)	:	1%
Indikator kinerja capaian	:	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan	:	700 Orang
Realisasi capaian kegiatan	:	0 Orang
Tingkat capaian kinerja (%)	:	0%

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan sub kegiatan belum terlaksana dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya di triwulan II s.d IV.

b. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

Pagu anggaran	:	Rp 10.000.000
Realisasi anggaran	:	Rp 0
Realisasi anggaran (%)	:	0%
Indikator kinerja capaian	:	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan

Terbina Relawan Pemadam
Kebakaran pada Lingkup
Sistem Ketahanan
Kebakaran Lingkungan
(SKKL) Setiap Tahunnya

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 20 Desa/Kelurahan

Realisasi capaian kegiatan : 0 Desa/Kelurahan

Tingkat capaian kinerja (%) : 0%

Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan sub kegiatan belum terlaksana dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya di triwulan II s.d IV.

4. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi

a. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Pagu anggaran : Rp 70.000.000

Realisasi anggaran : Rp 600.000

Realisasi anggaran (%) : 1%

Indikator kinerja capaian : Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai

Standar

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 8 Dokumen

Realisasi capaian kegiatan : 0 Dokumen

Tingkat capaian kinerja (%) : 0%

Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan sub kegiatan belum terlaksana dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya di triwulan II s.d IV.

b. Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi

Pagu anggaran : 10.000.000

Realisasi anggaran : 0

Realisasi anggaran (%) : 0%

Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan Aparatur
Pencarian dan Pertolongan
Terhadap Kondisi
Membahayakan Manusia/
Penyelamatan dan
Evakuasi yang Sah dan
Legal

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 2 Laporan

Realisasi cap keg : 0 Laporan

Tingkat cap kinerja (%) : 0%

Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi belum terlaksana atau belum memenuhi target kinerja maupun keuangan dikarenakan sub kegiatan belum terlaksana dan pelaksanaan kegiatan

selanjutnya di triwulan II s.d IV.

2. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja/hasil keluaran Adalah :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pagu anggaran : Rp 13.099.161.243

Realisasi anggaran : Rp 3.241.305.677

Realisasi anggaran (%) : 24,74%

Indikator kinerja capaian : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 178 orang

Realisasi capaian kegiatan : 178 orang

Tingkat capaian kinerja (%) : 100%

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN telah tercapai target kinerja yaitu 100%, hal ini disebabkan jumlah ASN di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berjumlah 178 orang yang terdiri dari PNS = 39 orang dan PPPK =139 orang.

3. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja/hasil keluaran Adalah :

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai 3 Program, 13 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan pada tahun 2025. Sampai dengan triwulan I tahun 2025 tidak ada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja/hasil keluaran dikarenakan masih di triwulan I, sehingga kegiatan cenderung sebagian besar belum berjalan dan/atau baru berjalan Sebagian dan pelaksanaan kegiatan di Triwulan II-IV.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya dan melebihi target kinerja program/kegiatan

a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan :

1. Kegiatan belum disusun secara rinci atau belum siap dilaksanakan di awal tahun.
2. Banyak kegiatan baru dimulai triwulan II, sehingga realisasi fisik dan keuangan masih rendah.
3. Adanya perubahan regulasi di tingkat pusat/daerah yang mengharuskan penyesuaian kegiatan atau administrasi.
4. Masalah pada aplikasi atau sistem yang menghambat input data atau proses kegiatan dari pra kegiatan.

b. Faktor-faktor penyebab tercapainya target kinerja program/kegiatan :

1. Kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas dan jadwal pelaksanaan yang realistis sejak awal tahun.
2. Tidak adanya mutasi/rotasi yang mengganggu pelaksanaan program maupun kegiatan.
3. Dukungan pimpinan terhadap pelaksanaan kegiatan secara aktif dan responsif.
4. Tidak ada hambatan dalam proses pencairan anggaran dari bendahara ke pelaksana kegiatan.
5. Tindakan korektif segera dilakukan jika ada keterlambatan atau kendala teknis.

c. Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan :

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum/tidak ada capaian kinerja yang melebihi target sehingga tidak/belum ada factor yang menjadi penyebabnya.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

- a. Terhambatnya pencapaian target Renstra secara keseluruhan
- b. Terpengaruhnya nilai kinerja dalam LAKIP/Sakip dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

- c. Keterlambatan kegiatan-kegiatan yang berdampak terhadap pelayanan publik.
- d. Dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan pimpinan daerah atas efektivitas kinerja Satpol PP dan Damkar.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan

- a. Menyusun Rencana Kerja yang lebih detil dan realistis
- b. Kegiatan prioritas dan mendesak diprogramkan di awal tahun.
- c. Identifikasi faktor risiko dalam pelaksanaan kegiatan (cuaca, anggaran, SDM) dan rencana mitigasinya.
- d. Menyusun timeline kegiatan lintas bidang agar tidak tumpang tindih dan bisa saling mendukung.
- e. Melakukan reviu dan koreksi terhadap pelaksanaan program secara berkala.
- f. Perencanaan Cash Flow yang efisien dengan menyusun rencana berdasarkan kebutuhan riil dan jadwal kegiatan.
- g. Optimalisasi belanja operasional rutin dengan mengalokasikan kegiatan yang bersifat operasional (pengawasan, patroli, penegakan perda ringan) secara merata sepanjang tahun agar serapan stabil.

Secara umum, semua kegiatan belum ada yang tercapai terkecuali Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Mengingat masih Triwulan I Tahun 2025 sehingga masih dalam proses persiapan kegiatan di Triwulan II sampai Tiwulan IV. Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kabupaten Kendal dapat dilihat pada Tabel T-C.29 di bawah ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kabupaten Kendal

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
1.05	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
1-05.0-00.0-00.03.01	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran									
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	11%	11%	100%	70%	70%
		Cakupan petugas Linmas di kabupaten per RT	1.4	1.4	1.4	1.66	119%	1.4	1.66	119%
		Persentase pelanggaran Perda/perkada yang diselesaikan	83%	83%	83%	12%	14%	83%	59%	71%
2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	12%	12%	100%	70%	70%
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari	400	100	100	100	100%	100	300	75%

		<i>penegakan perda dan perkada</i>								
03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	11	5	3	0	0%	3	8	73%
04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	108	81	12	3	25%	12	96	89%
05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	496	296	100	0	0%	100	396	80%
06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	29	21	4	0	0%	4	25	86%
08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	5	3	1	0	0%	1	4	80%
15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan CegahDini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	642	450	96	11	11%	96	557	87%
16	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan	535	335	100	12	12%	100	447	84%

	Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan								
17	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	30	20	5	0	0%	5	25	83%
18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	36	18	8	0	0	9	27	75
2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah perda/perkada yang ditertibkan	83%	83%	83%	11%	13%	83%	59%	71%
03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	471	96	125	165	132%	125	346	73.46%
		Jumlah berkas penyidikan	75	68	15	0	0%	15	83	110%
02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	350	180	80	17	21%	80	277	79%
2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	% PPNS yang dibina	100%	100%	100%	25%	25%	100%	75%	75%
01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	35	18	4	0	0%	12	26	74%
4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	<i>Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</i>	100%	100%	100%	25%	25%	100%	75%	75%
		<i>Prosentase Kelompok Balakar per Kecamatan</i>	100%	50%	50%	0	0%	50%	50%	50%

4.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	25%	25%	100	75	75%
02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.061	2331	365	90	25%	365	2.786	91%
03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1.800	1.080	360	39	11%	360	1.479	91%
07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	45	24	10	0	0%	10	34	76%
08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time	4	2	1	0	0%	1	3	75%
06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	163	88	35	0	0%	35	123	75%
09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan,	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan	15	9	3	0	0%	3	12	80%

	Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran								
4.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pesentase peralatan proteksi kebakaran yang terinspeksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	157	67	30	16	53%	30	113	72%
4.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase masyarakat dalam pencegahan kebakaran yang diberdayakan	100%	100%	100%	0%	0%	100%	67%	67%
01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	3.780	2.130	800	0	0%	800	2.930	78%
02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	100	40	20	0	0%	20	60	60%
4.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang diselenggarakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	37	24	7	0	0%	7	31	84%
04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan	11	7	2	0	0%	2	9	82%

	Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal								
1	Program Penunjang Urysan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	74.55	68.55	70.55	73	103%	72.55	73	97%
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18	12	3	0	0%	3	15	83%
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	4	1	0	0%	1	5	83%
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	4	1	0	0%	1	5	83%
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	4	1	0	0%	1	5	83%
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	4	1	0	0%	1	5	83%
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24	16	4	0	0%	4	20	83%
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	0%	100%	100%	67%	67%
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	230	138	178	178	100%	178	490	210%
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	4	1	0	0%	1	5	83%
07	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan	108	72	18	4	22%	18	94	87%

	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD								
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kedisiplinan administrasi pegawai	100%	100%	100%	0%	0%	100%	67%	67%
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	364	228	2	0	0%	2	230	63%
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22	14	4	0	0%	4	18	82%
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan rutin perkantoran	100%	100%	100%	25%	25%	100%	75%	75%
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32	24	4	0	0%	4	28	88%
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	13	1	0	0%	1	14	93%
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	42	30	6	0	0%	6	36	86%
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72	48	12	3	25%	12	63	88%
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	72	48	12	3	25%	12	63	88%
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	912	552	180	0	0%	180	732	80%
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	42	34	5	0	0%	5	39	93%
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100%	100%	25%	25%	100%	75%	75%
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perangko, Materai	72	48	12	3	25%	12	63	88%

		dan Benda Pos Lainnya								
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	48	12	3	25%	12	63	88%
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Pemeliharaan Alat Kantor	42	30	6	0	0%	6	36	86%
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	48	12	3	25%	12	63	88%
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100%	25%	25%	100%	75%	75%
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	336	222	57	0	0%	57	279	83%
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	336	222	57	6	11%	57	285	85%

2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Perangkat Daerah (OPD) yang baru terbentuk berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal merupakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah. Satpol PP dan Damkar dipimpin oleh Kepala Satpol PP dan Damkar yang berkududukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, Satpol PP dan Damkar dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satpol PP dan Damkar mempunyai tugas pokok Membantu Bupati melaksanakan sub urusan pemerintahan dibidang Ketentraman, Ketertiban umum, dan kebakaran yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Sedangkan menurut Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal, diuraikan sebagai berikut :

(1) Kedudukan Satpol PP dan Damkar

- a. Satpol PP dan Damkar merupakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.

- b. Satpol PP dan Damkar dipimpin oleh Kepala Satpol PP dan Damkar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Tugas Satpol PP dan Damkar

- a. Membantu Bupati melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(3) Fungsi Satpol PP dan Damkar

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran;
- f. Pelaksanaan administrasi Satpol PP dan Damkar di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satpol PP dan Damkar berdasarkan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan tolok ukur kinerjanya tetap berpedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) serta kebijakan yang berlaku demi terwujudnya pelayanan yang prima guna menunjang keberhasilan program/kegiatan yang ada, mewujudkan pelayanan publik di bidang ketentraman, ketertiban

umum dan kebakaran disamping memenuhi ketertiban dalam mengelola ketatausahaan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum, kinerja pelayanan Satpol PP menunjukkan tren yang cukup positif, ditandai dengan meningkatnya intensitas kegiatan penertiban, respon cepat terhadap aduan masyarakat, serta terjalinnya koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait seperti kepolisian, Dinas Sosial, dan Dinas Perhubungan. Kegiatan patroli rutin dan operasi gabungan berhasil menekan angka pelanggaran perda tertentu, khususnya di bidang ketertiban umum seperti pelanggaran jam operasional usaha, PKL di zona terlarang, serta pelanggaran ketertiban lalu lintas non-kepolisian.

Namun demikian, analisis kinerja juga menunjukkan beberapa kendala utama, antara lain:

1. Keterbatasan jumlah personel dan sarana prasarana

Jumlah anggota Satpol PP yang tersedia belum sebanding dengan cakupan wilayah kerja, sehingga menyebabkan keterbatasan dalam menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah pinggiran dan kawasan rawan pelanggaran.

2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi

Sistem pelaporan dan manajemen pengaduan masyarakat belum sepenuhnya terintegrasi dan digital, sehingga masih terdapat hambatan dalam hal dokumentasi kegiatan dan penyajian data kinerja secara real-time.

3. Kurangnya edukasi hukum kepada Masyarakat

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Perda dan peraturan kepala daerah masih rendah, yang menyebabkan pelanggaran terus berulang meskipun telah dilakukan penertiban.

4. Koordinasi lintas sektor yang belum maksimal

Dalam beberapa kegiatan penegakan hukum, koordinasi antarsektor masih belum berjalan efektif, khususnya dalam penanganan pelanggaran kompleks yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan keamanan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dalam dokumen Renja tahun berjalan, Satpol PP merumuskan kebijakan dan strategi perbaikan kinerja pelayanan, antara lain:

- Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur Satpol PP melalui pelatihan teknis dan pendidikan dasar penegakan hukum;
- Optimalisasi penggunaan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana operasional, seperti kendaraan patroli, peralatan komunikasi, dan perlengkapan personel;
- Pengembangan sistem informasi pelayanan dan pelaporan berbasis digital;
- Penguatan fungsi preventif melalui penyuluhan, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagai mitra ketertiban;
- Penguatan sinergi dengan TNI/Polri dan perangkat daerah lain dalam operasi terpadu.

Dengan analisis ini, Satpol PP berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kehadiran negara dalam penegakan aturan, serta menciptakan lingkungan yang tertib dan kondusif bagi masyarakat. Strategi perbaikan yang dirumuskan dalam Renja diharapkan mampu menjawab tantangan serta mendorong tercapainya target kinerja perangkat daerah secara optimal.

Rencana program dan kegiatan pada Satpol PP dan Damkar difokuskan pada perwujudan ketentraman, ketertiban umum serta penanganan bencana kebakaran. Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Kendal, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diharapkan semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motivator. Disamping itu,

fungsi perlindungan masyarakat saat ini juga menjadi bagian dari tugas Satpol PP dan Damkar dalam penyelenggaraannya. Pemberdayaan Satlinmas merupakan ujung tombak pelaksanaan perlindungan masyarakat, pengamanan, serta terciptanya ketentraman dan ketertiban dan penanganan bencana di Kabupaten Kendal.

Tolok ukur kinerja Satpol PP dan Damkar sebagai penegak Perda dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Satpol PP dan Damkar menitikberatkan pada penegakan produk-produk hukum dan peningkatan peran serta masyarakat dalam mematuhi peraturan dan upaya peningkatan kenyamanan dan keamanan lingkungan serta upaya-upaya dalam pencegahan bahaya kebakaran dan peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran. Hal itu berusaha diwujudkan dengan upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar atau tugas pokok fungsi (tupoksi) secara efektif dan efisiensi dengan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola Pemerintah yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja Pelayanan Satpol PP dan Damkar sebagaimana tersaji dalam T-C. 30 di bawah ini :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP dan Damkar Kab. Kendal

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Tahun 2025	Target Renja Tahun 2025	Realisasi Capaian Triwulan I Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Persentase gangguan	100	100	11	100

			Trantibum yang dapat diselesaikan				
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	0	100
3			Persentase penanganan kebakaran sesuai standar tingkat waktu respon (respon time)	100	100	100	100
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100

2.3 Realisasi Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dari pagu Rp 20.096.106.683 terealisasi Rp 3.719.072.583 dengan Tingkat capaian 18,51% yang secara rinci sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3

Realisasi Keuangan Perangkat Daerah**Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Pagu		Realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	Presentase Capaian (%)
			RKPD 2025	APBD 2025		
1	2	3	4	5		9
1.05	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
1-05.0-00.0-00.03.01	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		18.424.190.481	20.096.106.683	3.719.072.583	18,51
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	2.198.300.000	3.673.720.440	194.014.719	5,28
		Cakupan petugas Linmas di kabupaten per RT				
		Persentase pelanggaran Perda/perkada yang diselesaikan				
2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditindaklanjuti	1.633.300.000	1.336.200.000	188.178.219	14,08
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkada				
03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	30.000.000	30.000.000	0	0
04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.338.300.000	1.041.200.000	185.678.219	17,83
05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10.000.000	10.000.000	0	0
06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	15.000.000	15.000.000	0	0

08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	15.000.000	15.000.000	0	0
15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan CegahDini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	110.000.000	110.000.000	1.300.000	1,18
16	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	70.000.000	70.000.000	1.200.000	1,71
17	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	20.000.000	20.000.000	0	0
18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	25.000.000	25.000.000	0	0
2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah perda/perkada yang ditertibkan	515.000.000	2.287.520.440	4.386.500	0,19
03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	500.000.000	2.272.520.440	4.386.500	0,19
		Jumlah berkas penyidikan				
02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	15.000.000	15.000.000	0	0
2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	% PPNS yang dibina	50.000.000	50.000.000	1.450.000	2,90
01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	50.000.000	50.000.000	1.450.000	2,90
4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	<i>Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</i>	1.892.712.555	1.606.321.555	156.275.000	9,73
		<i>Prosentase Kelompok Balakar per Kecamatan</i>				

4.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.423.080.000	1.136.689.000	154.225.000	13,57
02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.013.080.000	777.160.000	135.675.000	17,46
03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	150.000.000	150.000.000	18.250.000	12,17
07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10.000.000	10.000.000	0	0
08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time	10.000.000	10.000.000	0	0
06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	220.000.000	169.529.000	0	0
09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	20.000.000	20.000.000	300.000	1,50
4.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pesentase peralatan proteksi kebakaran yang terinspeksi	10.000.000	10.000.000	1.200.000	12,00
02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	10.000.000	10.000.000	1.200.000	12,00
4.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase masyarakat dalam pencegahan kebakaran yang diberdayakan	379.632.555	379.632.555	250.000	0,07
01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	369.632.555	369.632.555	250.000	0,07
02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	10.000.000	10.000.000	0	0
4.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan	Persentase Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi	80.000.000	80.000.000	600.000	0,75

	Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang diselenggarakan				
02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	70.000.000	70.000.000	600.000	0,86
04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	10.000.000	10.000.000	0	0
1	Program Penunjang Urysan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	14.333.177.926	14.816.064.688	3.368.782.684	22,74
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	45.000.000	160.000.000	700.000	0,44
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	85.000.000	700.000	0,82
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	15.000.000	0	0
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	15.000.000	0	0
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.000.000	15.000.000	0	0
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.000.000	15.000.000	0	0
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	15.000.000	0	0
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	12.542.405.481	13.189.161.243	3.241.305.677	24,58
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12.452.405.481	13.099.161.243	3.241.305.677	24,74
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	10.000.000	0	0
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	80.000.000	80.000.000	0	0
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kedisiplinan administrasi pegawai	18.000.000	42.709.000	0	0
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Pakaian	0	24.709.000	0	0

	Kelengkapannya	Dinas dan Perlengkapannya				
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18.000.000	18.000.000	0	0
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan rutin perkantoran	856.671.445	751.343.000	42.080.200	5,60
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30.000.000	30.000.000	0	0
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.000.000	7.000.000	0	0
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15.000.000	6.116.940	0	0
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	81.000.000	80.000.000	12.669.000	15,84
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	81.000.000	80.000.000	12.726.400	15,91
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	562.671.445	468.226.060	0	0
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	80.000.000	80.000.000	16.684.800	20,86
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran	495.000.000	472.000.000	79.058.987	16,75
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	5.000.000	5.000.000	900.000	18,00
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	260.000.000	257.000.000	55.658.987	21,66
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70.000.000	50.000.000	14.550.000	29,10
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	160.000.000	160.000.000	7.950.000	4,97
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	376.101.000	200.851.445	5.638.000	2,81
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	300.901.000	150.851.445	0	0
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50.000.000	50.000.000	5.638.000	11,28
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25.200.000	0	0	0

➤ **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam rangka menindaklanjuti hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari berbagai tingkatan, instansi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) telah melakukan telaahan terhadap sejumlah usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat. Usulan tersebut mencerminkan kebutuhan riil masyarakat terhadap peningkatan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pelayanan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan.

Berdasarkan hasil inventarisasi, verifikasi, dan kajian awal, usulan masyarakat yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar secara umum mencakup hal-hal berikut:

1. Peningkatan Kapasitas, Pembinaan dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban. Masyarakat mengusulkan Peningkatan Kapasitas, Pembinaan dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat. Masyarakat menilai masih terbatasnya tingkat pembinaan linmas desa dan belum optimalnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Telaahan dan Pertimbangan

Setelah dilakukan telaahan, beberapa pertimbangan yang digunakan dalam mengevaluasi usulan tersebut antara lain:

- Kesesuaian dengan Tupoksi Satpol PP dan Damkar: Usulan harus sesuai dengan kewenangan instansi, baik dalam hal penegakan perda maupun pelayanan penanggulangan kebakaran.
- Skala Prioritas dan Urgensi: Usulan yang memiliki tingkat urgensi tinggi dan potensi risiko terhadap keselamatan masyarakat mendapat prioritas lebih tinggi.
- Ketersediaan Anggaran dan Sumber Daya: Beberapa usulan memerlukan alokasi anggaran besar dan perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

- Dukungan dari Masyarakat dan Kelayakan Teknis: Usulan yang didukung partisipasi masyarakat dan dinilai layak secara teknis lebih memungkinkan untuk diakomodasi dalam rencana kerja.

Dari hasil telaahan tersebut, usulan-usulan yang dinilai memenuhi kriteria prioritas dan kelayakan akan diproses lebih lanjut untuk diakomodasi dalam Rencana Kerja Satpol PP dan Damkar.

Dengan adanya telaahan ini, diharapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP dan Damkar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka menciptakan ketentraman, ketertiban, dan rasa aman bagi seluruh warga.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2025–2029, yaitu "Bersama membangun Kendal semakin maju, sejahtera, adil, makmur, lestari, dan berkelanjutan," dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal yang selaras dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu Misi III: “Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stake holder Pembangunan”.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan daerah, efisiensi belanja sesuai arahan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, serta prioritas program Pemerintah Kabupaten Kendal pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka Rencana Kerja dan Pendanaan melakukan efisiensi belanja pada Perubahan Rencana Tahun 2025 terdiri dari 3 program dan 13 kegiatan, dengan nominal anggaran penetapan sebesar Rp 20.096.106.683,- berkurang Rp 585.571.513,-, sehingga menjadi Rp 19.510.535.170,-. Adapun program/kegiatan yang pada Perubahan APBD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Penetapan : Rp 85.000.000

Perubahan : Rp 49.574.000

Berkurang Rp 35.426.000 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.

b. Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD

Penetapan : Rp 15.000.000

Perubahan : Rp 5.000.000

Berkurang Rp 10.000.000 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.

c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD

Penetapan : Rp 15.000.000

Perubahan : Rp 5.000.000

Berkurang Rp 10.000.000 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Penetapan : Rp 15.000.000

Perubahan : Rp 4.490.000

Berkurang Rp 10.510.000 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Penetapan : Rp 15.000.000

Perubahan : Rp 1.500.000

Berkurang Rp 13.500.000 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penetapan : Rp 15.000.000

Perubahan : Rp 0

Berkurang Rp 15.000.000 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penetapan : Rp 13.099.161.243

Perubahan : Rp 14.621.254.826

Bertambah Rp 1.522.093.583 dikarenakan kebutuhan gaji dengan adanya penambahan ASN.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Penetapan : Rp 10.000.000

Perubahan : Rp 2.000.000

Berkurang Rp 8.000.000 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Penetapan : Rp 80.000.000

Perubahan : Rp 32.400.000

Berkurang Rp 47.600.000 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Penetapan : Rp 24.709.000

Perubahan : Rp 22.709.000

Berkurang Rp 22.0000.000 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.

b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Penetapan : Rp 18.000.000

Perubahan : Rp 0

Berkurang Rp 18.0000.000 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penetapan : Rp 30.000.000

Perubahan : Rp 15.000.000

Berkurang Rp 15.000.000 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penetapan : Rp 7.000.000

Perubahan : Rp 0

Berkurang Rp 7.000.000 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penetapan : Rp 6.116.940

- Perubahan : Rp 0
- Berkurang Rp 6.116.940 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penetapan : Rp 80.000.000
- Perubahan : Rp 54.063.000
- Berkurang Rp 25.937.000 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penetapan : Rp 80.000.000
- Perubahan : Rp 37.685.600
- Berkurang Rp 42.314.400 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penetapan : Rp 468.226.060
- Perubahan : Rp 76.652.866
- Berkurang Rp 391.573.194 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.
- g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Penetapan : Rp 80.000.000
- Perubahan : Rp 25.000.000
- Berkurang Rp 55.000.000 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penetapan : Rp 5.000.000
- Perubahan : Rp 5.000.000
- Tidak bertambah maupun berkurang dikarenakan kebutuhan akan benda-benda pos (surat menyurat) sudah sesuai.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penetapan : Rp 257.000.000
- Perubahan : Rp 256.985.600
- Berkurang Rp 14.400 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang

berlaku.

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penetapan : Rp 50.000.000

Perubahan : Rp 35.260.000

Berkurang Rp 14.740.000 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penetapan : Rp 160.000.000

Perubahan : Rp 174.300.000

Bertambah Rp 14.300.000 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan prioritas yaitu pemeliharaan website.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penetapan : Rp 150.851.445

Perubahan : Rp 92.034.645

Berkurang Rp 58.816.800 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Penetapan : Rp 50.000.000

Perubahan : Rp 49.585.000

Berkurang Rp 415 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penetapan : Rp 50.000.000

Perubahan : Rp 35.260.000

Berkurang Rp 14.740.000 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.

II. **Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
 Penetapan : Rp 30.000.000
 Perubahan : Rp 0
 Berkurang Rp 30.000.000 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.
- b. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
 Penetapan : Rp 1.041.200.000
 Perubahan : Rp 887.920.000
 Berkurang Rp 153.280.000 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.
- c. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 Penetapan : Rp 10.000.000
 Perubahan : Rp 450.000
 Berkurang Rp 9.550.000 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.
- d. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 Penetapan : Rp 15.000.000
 Perubahan : Rp 2.000.000
 Berkurang Rp 13.000.000 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.
- e. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 Penetapan : Rp 15.000.000
 Perubahan : Rp 1.680.000
 Berkurang Rp 13.320.000 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.
- f. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan

Penetapan : Rp 110.000.000

Perubahan : Rp 39.000.000

Berkurang Rp 71.000.000 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.

- g. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Penetapan : Rp 70.000.000

Perubahan : Rp 43.950.000

Berkurang Rp 26.050.000 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.

- h. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

Penetapan : Rp 20.000.000

Perubahan : Rp 5.016.900

Berkurang Rp 14.983.100 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.

- i. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Penetapan : Rp 25.000.000

Perubahan : Rp 0

Berkurang Rp 25.000.000 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

- a. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Penetapan : Rp 2.272.520.440

Perubahan : Rp 1.429.050.440

Berkurang Rp 1.201.830.000 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.

- b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

Penetapan : Rp 15.000.000

Perubahan : Rp 4.100.000

Berkurang Rp 10.900.000 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.

3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

a. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Penetapan : Rp 50.000.000

Perubahan : Rp 50.000.000

Tidak bertambah/berkurang dikarenakan sudah sesuai kebutuhan akan pengembangan karier PPNS.

III. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN dan PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Penetapan : Rp 777.160.000

Perubahan : Rp 816.000.000

Bertambah Rp 38.840.000 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan petugas pemadam kebakaran non ASN.

b. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

Penetapan : Rp 150.000.000

Perubahan : Rp 91.572.000

Berkurang Rp 58.428.000 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.

c. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

Penetapan : Rp 10.000.000

Perubahan : Rp 0

Berkurang Rp 10.000.000 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.

d. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan

Penyelamatan (SKIK)

Penetapan : Rp 10.000.000

Perubahan : Rp 6.070.000

Berkurang Rp 3.930.000 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.

e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Penetapan : Rp 169.529.000

Perubahan : Rp 113.237.750

Berkurang Rp 56.291.250 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.

f. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Penetapan : Rp 20.000.000

Perubahan : Rp 1.500.000

Berkurang Rp 18.500.000 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.

2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

a. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Penetapan : Rp 10.000.000

Perubahan : Rp 5.000.000

Berkurang Rp 5.000.000 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.

3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Penetapan : Rp 369.632.555

Perubahan : Rp 426.053.543

Bertambah Rp 56.420.988 dikarenakan ada penambahan dalam DAU Pendidikan.

b. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

Penetapan : Rp 10.000.000

Perubahan : Rp 14.078.000

Bertambah Rp 14.078.000 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

4. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi

a. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi

Penetapan : Rp 70.000.000

Perubahan : Rp 50.558.000

Berkurang Rp 19.442.000 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.

b. Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi

Penetapan : Rp 10.000.000

Perubahan : Rp 7.804.000

Berkurang Rp Berkurang Rp 19.442.000 dikarenakan efisiensi anggaran sesuai SE yang berlaku.

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025		Pagu Indikatif		Bertambah /Berkurang
			Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2	3	4	5			9
1.05	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
1-05.0-00.0-00.03.01	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				20.096.106.683	19.510.535.170	(585.571.513)
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	3.673.720.440	2.413.167.340	(1.260.553.100)
		<i>Cakupan petugas Linmas di kabupaten per RT</i>	1,4	1,4			
		<i>Persentase pelanggaran Perda/perkada yang diselesaikan</i>	100	100			
2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkada</i>	100	100	1.336.200.000	980.016.900	(356.183.100)
03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dok	0 Dok	30.000.000	0	(30.000.000)
04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dok	12 Dok	1.041.200.000	887.920.000	(153.280.000)
05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 orang	0 Orang	10.000.000	450.000	(9.550.000)
06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dok	4 Dok	15.000.000	2.000.000	(13.000.000)

08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dok	0 Dok	15.000.000	1.680.000	(13.320.000)
15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan CegahDini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	96 Lap	96 Lap	110.000.000	39.000.000	(71.000.000)
16	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	100 Lap	100 Lap	70.000.000	43.950.000	(26.050.000)
17	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	5 Lap	5 Lap	20.000.000	5.016.900	(14.983.100)
18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	8 Unit	0	25.000.000	0	(25.000.000)
2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah perda/perkada yang ditertibkan	18 Jenis	18 Jenis	2.287.520.440	1.433.150.440	(854.370.000)
03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	130 Lap	125 Lap	2.272.520.440	1.429.050.440	(843.470.000)
		Jumlah berkas penyidikan	15 Berkas	15 Berkas			
02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	70 Lap	70 Lap	15.000.000	4.100.000	(10.900.000)
2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	% PPNS yang dibina	100 %	100 %	50.000.000	50.000.000	0
01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman	8 Lap	8 Lap	50.000.000	50.000.000	0

		Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada					
4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	1.606.321.555	1.531.873.293	(74.448.262)
		Persentase desa/kelurahan yang memiliki relawan kebakaran	100 %	100 %			
4.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	1.136.689.000	1.028.379.750	(108.309.250)
02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	365 Lap	365 Lap	777.160.000	816.000.000	(38.840.000)
03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	360 Dok	360 Dok	150.000.000	91.572.000	(58.428.000)
07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 orang	0 orang	10.000.000	0	(10.000.000)
08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time	1 Desa/Kel	1 Desa/Kel	10.000.000	6.070.000	(3.930.000)
06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	35 Unit	35 Unit	169.529.000	113.237.750	(56.291.250)
09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	3 Dok	3 Dok	20.000.000	1.500.000	(18.500.000)
4.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pesentase peralatan proteksi kebakaran yang terinspeksi	100%	100%	10.000.000	5.000.000	(5.000.000)
02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	30 Dok	30 Dok	10.000.000	5.000.000	(5.000.000)
4.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam	Persentase masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100%	100%	379.632.555	440.131.543	60.498.988

	Pencegahan Kebakaran	yang diberdayakan					
01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	750 Orang	800 Orang	369.632.555	426.053.543	56.420.988
02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	20 Desa/Kel	20 Desa/Kel	10.000.000	14.078.000	(4.078.000)
4.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang diselenggarakan			80.000.000	58.362.000	(21.638.000)
02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	7 Dok	8 Dok	70.000.000	50.558.000	(19.442.000)
04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	2 Lap	2 Lap	10.000.000	7.804.000	(2.196.000)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	74,55	74,55		15.565.494.537	749.429.849
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100%	100%	160.000.000	65.564.000	(94.436.000)
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok	85.000.000	49.574.000	(30.426.000)
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	15.000.000	5.000.000	(10.000.000)
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	15.000.000	5.000.000	(10.000.000)
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	15.000.000	4.490.000	(10.510.000)
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	15.000.000	1.500.000	(13.500.000)

06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap	0	15.000.000	0	(15.000.0000)
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%	100%	13.189.161.243	14.655.654.826	1.466.493.583
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	178 Orang/bulan	253 orang/bulan	13.099.161.243	14.621.254.826	1.522.093.583
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	10.000.000	2.000.000	(8.000.000)
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	18 Lap	18 Lap	80.000.000	32.400.000	(57.600.000)
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kedisiplinan administrasi pegawai	100%	100%	42.709.000	22.709.000	(20.000.000)
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	2 Paket	2 Paket	24.709.000	22.709.000	(2.000.000)
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 orang	0 orang	18.000.000	0	(18.000.000)
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan rutin perkantoran	100%	100%	751.343.000	208.401.466	(542.941.534)
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	4 Paket	30.000.000	15.000.000	(15.000.000)
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	7.000.000	0	(7.000.000)
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	0 Paket	6.116.940	0	(6.116.940)
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	80.000.000	54.063.000	(25.937.000)
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	80.000.000	37.685.600	(42.314.400)
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Lap	180 Lap	468.226.060	76.652.866	(391.573.194)
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	80.000.000	25.000.000	(55.000.000)
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100%	472.000.000	471.545.600	(454.400)
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	4 lap	4 lap	5.000.000	5.000.000	0

02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	257.000.000	256.985.600	(14.400)
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Pemeliharaan Alat Kantor	6 Lap	6 Lap	50.000.000	35.260.000	(14.740.000)
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	160.000.000	174.300.000	14.300.000
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	200.851.445	141.619.645	(59.231.800)
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	57 Unit	57 Unit	150.851.445	92.034.645	(58.816.800)
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit	57 Unit	50.000.000	49.585.000	(415.000)

Adapun Lampiran Rancangan Akhir Perubahan RKPD 2025 hasil printout sipd.kemendagri.go.id sebagaimana Tabel berikut ini ;

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KENDAL TAHUN 2025																					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REVISI OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							18.424.190.481,00	20.096.106.683,00	19.510.535.170,00	1.086.344.689,00							26.765.138.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.424.190.481,00	20.096.106.683,00	19.510.535.170,00	1.086.344.689,00							26.765.138.000,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							18.424.190.481,00	20.096.106.683,00	19.510.535.170,00	1.086.344.689,00							26.765.138.000,00		
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD				100 Persen	100 Persen	14.333.177.926,00	14.816.064.688,00	15.566.494.537,00	3.694.240.074,00							18.027.418.000,00		
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dibagi jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai ketentuan yang berlaku di kab. kendal				100 Persen	100 Persen	45.000.000,00	160.000.000,00	65.564.000,00	20.564.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-	Perangkat Daerah	40.990.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	85.000.000,00	49.574.000,00	34.574.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		17.540.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		3.850.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		3.850.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	15.000.000,00	4.490.000,00	-510.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		3.850.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	15.000.000,00	1.500.000,00	-3.500.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		3.850.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		8.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, penganggaran dan keuangan perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	12.542.405.481,00	13.189.161.243,00	14.655.654.826,00	2.113.249.345,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-	Perangkat Daerah	15.309.074.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				178 Orang/ bulan	178 Orang/ bulan	12.452.405.481,00	13.099.161.243,00	14.621.254.826,00	2.168.849.345,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		15.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			5.562.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula n/Semesteran SKPD				16 Laporan	16 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	32.400.000,00	-47.600.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			3.512.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kedisiplinan administrasi pegawai				100 Persen	100 Persen	18.000.000,00	42.709.000,00	22.709.000,00	4.709.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Perangkat Daerah		159.631.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	24.709.000,00	22.709.000,00	22.709.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			99.631.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan rutin perkantoran				100 Persen	100 Persen	856.671.445,00	751.343.000,00	208.401.466,00	-648.269.979,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Perangkat Daerah		788.664.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			33.201.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			136.022.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	15.000.000,00	6.116.940,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			38.107.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	81.000.000,00	80.000.000,00	54.063.000,00	-26.937.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			69.846.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025				RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL				DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengantaraan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	81.000.000,00	80.000.000,00	37.665.600,00	-43.314.400,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			54.316.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				768 Dokumen	768 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			8.323.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan pengantaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180 Laporan	180 Laporan	562.671.445,00	468.226.060,00	76.652.866,00	-486.018.579,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			341.966.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	25.000.000,00	-55.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			106.883.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah	736.752.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		569.752.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.07.0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		167.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	495.000.000,00	472.000.000,00	471.545.600,00	-23.454.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah	466.807.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6.482.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	260.000.000,00	257.000.000,00	256.985.600,00	-3.014.400,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		247.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	70.000.000,00	50.000.000,00	35.260.000,00	-34.740.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		61.325.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	160.000.000,00	160.000.000,00	174.300.000,00	14.300.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		152.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEBUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran				100 Persen	100 Persen	376.101.000,00	200.851.445,00	141.619.645,00	-234.481.355,00			-	-	Perangkat Daerah		525.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				57 Unit	57 Unit	300.901.000,00	150.851.445,00	92.034.645,00	-208.866.355,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			237.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				57 Unit	57 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	49.585.000,00	-415.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			48.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	25.200.000,00	0,00	0,00	-25.200.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			240.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				100 Persen	100 Persen	2.198.300.000,00	3.673.720.440,00	2.413.167.340,00	767.230.000,00							2.965.530.000,00		
1.05.02.2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan sabbat dari penegakan perda dan perkara				100 Persen	100 Persen	1.633.300.000,00	1.336.200.000,00	980.016.900,00	-653.283.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat	2.648.796.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
1.05.02.2.01.0003		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.02.2.01.0004		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	1.338.300.000,00	1.041.200.000,00	887.920.000,00	-450.380.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.903.630.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.02.2.01.0005		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				100 Orang	100 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	450.000,00	-9.550.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			116.220.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.02.2.01.0006		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	2.000.000,00	-13.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			50.781.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.02.2.01.0008		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	1.680.000,00	-13.320.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.02.2.01.0015		Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				96 laporan	96 laporan	110.000.000,00	110.000.000,00	39.000.000,00	-71.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.02.2.01.0016		Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				100 Laporan	100 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	43.950.000,00	-26.050.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			147.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.02.2.01.0017		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				5 Laporan	5 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	5.016.900,00	-14.983.100,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			15.375.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)												TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SEDUHAH	RKPD 2025	APBD 2025														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Keterliban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Keterliban Umum yang Tersedia				8 Unit	8 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRJAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-				-	-	515.000.000,00	2.287.520.440,00	1.433.150.440,00	918.150.440,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	Masyarakat	190.774.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRJAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Alas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Alas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				130 Laporan	130 Laporan	500.000.000,00	2.272.520.440,00	1.429.050.440,00	929.050.440,00	Semua KotaKab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DBH CIUKAI HASIL TEMBAKAJU (CHT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		82.774.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRJAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Alas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				70 Laporan	70 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	4.100.000,00	-10.900.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		108.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRJAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang dibina				8 Orang	8 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	PNS Satpotkar	126.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRJAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Pidana				8 Laporan	8 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		126.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRJAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				100 Persen	100 Persen	1.892.712.555,00	1.606.321.555,00	1.531.873.293,00	3.879.477.445,00							5.772.190.000,00					
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				100 Persen	100 Persen	1.423.080.000,00	1.136.689.000,00	1.028.379.750,00	-394.700.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	Masyarakat	5.151.025.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRJAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Rasioyangan Petugas Pihot dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				365 Laporan	365 Laporan	1.013.080.000,00	777.160.000,00	816.000.000,00	-197.080.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		3.936.025.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRJAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Rasioyangan Petugas Pihot dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				360 Dokumen	360 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	91.572.000,00	-58.428.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRJAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				10 Orang	10 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRJAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Biasa & Secara Perlahan atau Dimadatkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya				1 Desa/Kelurahan	1 Desa/Kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	6.070.000,00	-3.930.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRJAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025				PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL	DAERAH										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				35 Unit	35 Unit	220.000.000,00	169.529.000,00	113.237.750,00	-106.762.250,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Komitmen dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	1.500.000,00	-18.500.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang terinspeksi				100 Persen	100 Persen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat		66.550.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran					30 Dokumen	30 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			66.550.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran yang diberdayakan	Persentase masyarakat dalam pencegahan kebakaran yang diberdayakan				100 Persen	100 Persen	379.632.555,00	379.632.555,00	440.131.543,00	60.498.988,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		319.615.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat					800 Orang	800 Orang	369.632.555,00	369.632.555,00	426.053.543,00	56.420.988,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGOLUANNH YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			219.615.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				20 Desa/Kelurahan	20 Desa/Kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	14.078.000,00	4.078.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/penyelaatan dan Evakuasi yang diselenggarakan				100 Persen	100 Persen	80.000.000,00	80.000.000,00	58.362.000,00	-21.638.000,00			-	-	Masyarakat		235.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/penyelamatan dan Evakuasi					7 Dokumen	7 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	50.558.000,00	-19.442.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/penyelamatan dan Evakuasi					2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	7.804.000,00	-2.196.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
			J U M L A H						18.424.190.481,00	20.096.106.683,00	19.510.535.170,00	-67.112.674.266,00							26.765.138.000,00				

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Tahun 2025 merupakan kelanjutan dari program kerja sebelumnya, guna memberikan arah dan pedoman pelaksanaan tugas.

Dengan adanya dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat membantu dalam penyusunan rencana anggaran sehingga lebih tepat untuk melaksanakan kegiatan yang diprioritaskan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

1. Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Kendal mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kendal. Program dan kegiatan yang direncanakan diharapkan dapat mendukung tercapainya target dalam RPJMD Kabupaten Kendal
2. Perubahan Renja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Kendal mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Kendal. Program dan kegiatan yang direncanakan diharapkan dapat mendukung tercapainya target dalam Renstra Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal.
3. Perubahan Renja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Kendal Tahun 2025 ini juga sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Kendal Tahun 2025.

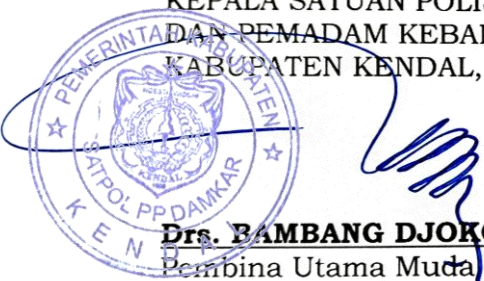
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Tahun 2025 ini perlu memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam menyikapi permasalahan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kabupaten Kendal. Dengan adanya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Tahun 2025 ini, maka penetapan prioritas pembangunan

yang merupakan upaya penjabaran tujuan, sasaran, maupun arah kebijakan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Sebagai langkah tindak lanjut, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal terus berupaya melakukan penyempurnaan dan peningkatan kualitas internal. Sasaran yang ingin diwujudkan dari penyempurnaan dan peningkatan kualitas adalah :

1. Peningkatan kapasitas, kapabilitas dan kompetensi SDM
2. Meningkatkan peran aktif baik individu pegawai/personal maupun satuan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi dari Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
4. Meningkatkan sosialisasi, bimbingan teknis dan asistensi untuk mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KENDAL,



Drs. BAMBANG DJOKO PITONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19690323 199003 1 008